

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Papua New Guinea (PNG) berdiri sebagai sebuah negara merdeka pada tanggal 16 September 1975. Sebelumnya negara ini berada di bawah mandat teritori Australia dan atas kebijakan PBB tersebut PNG diatur untuk menjadi sebuah negara merdeka. Secara geografis, PNG terletak di antara dua negara yaitu Indonesia di bagian barat dan Australia di bagian selatan. Luas seluruh PNG 461.690 Km², dengan luas tanah sekitar 451.710 Km² dan berada pada 141⁰ dan 160⁰ Bujur Timur serta 1⁰ dan 12⁰ Lintang Selatan. Wilayah tersebut meliputi satu pulau besar yang disebut New Guinea Timur dan rangkaian 600 pulau-pulau kecil, diantaranya pulau-pulau New Britain (36.500 Km²), dan New Ireland (9.600 Km²) di gugusan kepulauan Bismarck, Manus (2.100 Km²) dan Bougainville, Buka dan lain-lain membentuk 9.600 Km² (Hamid,1996: 69-70).

Penduduk PNG terdiri dari berbagai kelompok etnis yaitu orang-orang Melanesia, Cina, Eropa, Polinesia, dan lain-lain. Faktor tersebut menunjukkan heterogenitas penduduk PNG, heterogenitas PNG terlihat juga dalam konteks bahasa. Dalam artikel yang ditulis oleh Keith Suter ([http:// www.findarticles.com /p/ articles/ mi_m2242/ is_n1590_v273/ ai_21024487](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2242/is_n1590_v273/ai_21024487)), disebutkan bahwa bahasa yang digunakan di PNG mencapai lebih dari 700 bahasa. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Inggris, tetapi penggunaannya terbatas di kalangan orang-orang terpelajar dan pejabat-pejabat pemerintah. Bahasa utama lainnya yaitu bahasa *Pidgin* di New Guinea dan bahasa *Motu* di Papua. Bahasa *Pidgin* pada

perkembangannya menyerap bahasa Inggris yang kemudian menjadi bahasa *Pidgin-English*. Masyarakat PNG menganut kepercayaan terhadap nenek moyang mereka. Dengan datangnya bangsa Eropa yang disertai kaum misionaris membawa pengaruh dalam kehidupan agama penduduk setempat, yaitu munculnya kepercayaan terhadap Tuhan.

Salah satu wilayah yang berjauhan dengan pusat ibukota adalah Bougainville. Pulau Bougainville adalah pulau yang letaknya paling timur dari wilayah PNG. Pulau ini juga merupakan bagian wilayah PNG yang letaknya paling jauh dari pusat pemerintahan, yaitu sekitar 600 Km dari Port Moresby, ibukota PNG. Dengan demikian, Bougainville adalah wilayah yang memiliki akses rendah terhadap pusat pemerintahan. Di sisi lain Bougainville merupakan wilayah yang sangat kaya. Secara ekonomi, Bougainville kaya akan sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan hasil perkebunan seperti kopi, coklat dan kopra. Pulau ini menghasilkan 1/6 dari kopra yang dihasilkan oleh PNG, dengan hasil kepulauan 0,48 ton per hektar. Hasil itu merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di PNG. Bougainville juga menghasilkan 1/6 kopi yang didapat dari seluruh PNG dengan rata-rata kebun menghasilkan 0,23 ton per hektar.

Menurut Sanapid (Hamid, 1996:96), wilayah Bougainville kaya akan sumber mineral. Daerah Panguna diperkirakan terdapat kandungan mineral sebesar 1 milyar ton, dengan 0,48% terdiri dari tembaga dan 0,32 kg emas per ton mineral. Keadaan itu mendorong Perusahaan Conzino Rio Tinto dan North

Broken Hill dari Australia menanamkan modalnya sebesar 300 juta Dollar untuk menambang sebanyak 160.000 ton tembaga dan 500.000 ons emas setiap tahun.

Masyarakat Bougainville dilihat dari ciri-ciri fisik yang sedikit lebih berbeda dari masyarakat PNG yang lainnya, orang-orang Bougainville lebih hitam dengan terdapat 19 bahasa ibu yang dipakai oleh sekitar 14 suku dan terdapat suku yang hanya mengerti 3 bahasa ibu dan ada pula satu bahasa Ibu yang hanya dimengerti oleh kurang dari 50 orang (Premdas, 1977:30). Secara geografi dan secara antropologis, masyarakat Bougainville lebih dekat ciri-ciri dan letaknya dengan Negara Kepulauan Solomon sehingga hal-hal yang memungkinkan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat lebih besar. Perbedaan-perbedaan yang terlihat antara penduduk yang tinggal di Bougainville dengan penduduk yang ada di Port Moresby menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah PNG.

Masalah integrasi menjadi masalah umum bagi sebagian besar negara yang baru merdeka. Ketidaksamaan pemikiran dalam hal integrasi yang disatukan dalam sebuah negara akan mengancam negara tersebut untuk pecah, sehingga akan menghambat laju pembangunan yang dijalankan sebuah negara seperti pembangunan ekonomi, kestabilan politik, pembangunan pendidikan sampai pada infra struktur lainnya akan terkesampingkan. Masalah integrasi yang dialami oleh Papua New Guinea menjadi masalah mendasar yang harus dihadapi Pemerintah Papua dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di salah satu wilayah Bougainville

Pada tahun 1975, para tokoh masyarakat Bougainville menyatakan kemerdekaan Bougainville dan menamakan wilayah ini sebagai Republik

Solomon Utara. Gerakan pemisahan diri Bougainville disebut sebagai gerakan 'penentuan nasib sendiri'. Mereka menyatakan bahwa klaim PNG atas Bougainville adalah sebuah kolonialisme dan bertentangan dengan semangat nasionalisme. Para pemimpin gerakan pemisahan diri tersebut menggunakan argumen anti kolonial dalam perjuangan mereka, antara lain dari kesatuan yang ada. Mereka mendasarkan tuntutan mereka atas penyatuan yang salah antara wilayah-wilayah kolonial khususnya Australia sebagai Mandat Teritori Papua New Guinea.

Francis Ona dibawah naungan *Bougainville Revolutionary Army* (BRA) memunculkan masalah yang berkepanjangan dengan terjadinya aksi-aksi pemboikotan yang berujung pada serangkaian konfrontasi sampai tahun 1992. Sementara itu pemerintah dan BRA melakukan perundingan di Honiara pada tanggal 23 Januari 1991 yang menghasilkan deklarasi Honiara. Perundingan yang dilakukan pemerintah pada masa Perdana Menteri Rabbie Namaliu menjadi awal pemecahan masalah integrasi di Papua New Guinea

Gerakan separatisme di Bougainville akhirnya berkembang pesat, banyak tokoh-tokoh Bougainville yang simpati terhadap gerakan separatis ini. Selain itu, gerakan separatisme ini ternyata mendorong keterlibatan negara lain diantaranya Australia dan New Zealand dalam mengatasi masalah di Bougainville. Apakah masalah separatisme di Bougainville ini hanya karena perbedaan etnis saja? atau ada faktor lain dengan adanya keterlibatan negara lain.

Berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah PNG dengan Bougainville

Revolutionary Army (BRA) yang melakukan gerakan separatisme terhadap PNG dengan judul “Gerakan Separatisme Bougainville di Papua New Guinea tahun 1975-1992”.

1.2. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah gerakan separatisme Bougainville yang terjadi di Papua New Guinea tahun 1975-1992”. Untuk lebih mengarahkan jalannya penelitian, selanjutnya diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi gerakan separatisme Bougainville di Papua New Guinea?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Papua New Guinea dalam mengatasi gerakan separatisme di Bougainville tahun 1975-1992?
3. Apa dampak politik dan ekonomi yang ditimbulkan gerakan separatisme Bougainville di Papua New Guinea?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis latar belakang terjadinya gerakan separatisme Bougainville di Papua New Guinea tahun 1975-1992.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Papua New Guinea dalam mengatasi gerakan pemisahan diri Bougainville dari tahun 1975-1992.

3. Menemukan dampak politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan separatisme Bougainville di Papua New Guinea

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Memperkaya penulisan sejarah tentang kawasan Papua New Guinea khususnya wilayah Bougainville.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian sejarah mengenai gerakan separatis yang terjadi di negara Papua New Guinea.

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif analitis, dimana metode tersebut berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan akibat atau efek yang terjadi (Sumanto, 1992:71). Untuk memperjelas penelitian tersebut didukung dengan metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah. Metode historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini dituntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu metode historis juga mengandung pengertian

sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32).

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Helius Sjamsuddin, (2007:85-155) metode historis mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

1. Heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah), dalam hal ini penulis menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan penelitian ;
2. Kritik sumber, yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung ;
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung ;
4. Historiografi, merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan skripsi, penulis melakukan satu teknik penelitian. Teknik penelitian yang dimaksud adalah cara-cara atau usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh data. Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur. Pada tahap ini penulis mencari, membaca, serta meneliti sumber-sumber tertulis berupa arsip, buku, artikel dan sumber relevan lainnya yang ada hubungannya dengan Gerakan Separatisme Bougainville di Papua New Guinea tahun 1975-1992.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang munculnya gerakan separatisme Bougainville dilihat dari masalah aspek ekonomi dan politik. Dengan melihat kedua aspek tersebut dan diperinci menjadi rumusan masalah dan pembatasan masalah yang relevan sehingga dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Bab ini juga terdiri dari tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan untuk menguatkan penulisan skripsi ini. Pada bagian akhir Bab ini memuat tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai kerangka dalam menuliskan kajian sejarah yang akan dibahas beserta dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini dijelaskan tentang beberapa kajian dan materi yang berkaitan dengan Gerakan Separatisme Bougainville di Papua New Guinea tahun 1975-1992, diantaranya berbagai tinjauan mengenai gerakan separatisme Bougainville di Papua New Guinea dilihat dari latar belakang kehidupan masyarakat Bougainville yang secara umum dari berbagai literatur yang ada menurut sumber yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini akan dijelaskan tentang serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis, diantaranya heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Kritik yaitu proses pengolahan data sejarah sehingga menjadi fakta yang reliabel dan otentik, interpretasi yaitu

penafsiran sejarawan terhadap fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan dan metode penafsiran tertentu, serta historiografi yaitu proses penulisan fakta-fakta sejarah.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini penulis membahas tentang Gerakan Separatisme Bougainville di Papua New Guinea. Di dalamnya menguraikan mengapa terjadi gerakan separatis Bougainville tahun 1975-1992, serta dampak yang ditimbulkan dari gerakan separatis Bougainville terhadap aspek politik dan ekonomi di Papua New Guinea serta memaparkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Papua New Guinea dalam mengatasi gerakan separatis Bougainville di Papua New Guinea.

Bab V Kesimpulan. Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang permasalahan yang dikaji penelitian ini.